

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan *transnational cybercrime*, khususnya dalam kasus *love scam* oleh warga negara asing asal Tiongkok di Batam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Divisi Hubungan Internasional Polri memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* transnasional, termasuk dalam hal koordinasi dengan instansi internasional serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku.

Evaluasi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Internasional Polri menunjukkan bahwa upaya mereka dalam menangani kasus *love scam* oleh warga negara Tiongkok di Batam belum sesuai dengan prosedur dan standar penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan pihak terkait kasus tersebut tidak diadili di Indonesia, sehingga mengurangi efektivitas dan kepastian hukum bagi korban. Meskipun ada upaya penangkapan dan penahanan serta kerja sama dengan pihak imigrasi dan instansi terkait lainnya, kendala seperti perbedaan yurisdiksi dan ketidakmampuan untuk membawa pelaku ke pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyber transnasional.

B. Saran

Penting untuk menegaskan bahwa konsistensi dalam penegakan hukum nasional adalah kunci untuk memperkuat kredibilitas sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus-kasus kejahatan transnasional termasuk *love scam* di Batam, Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia diadili secara adil dan transparan tanpa memandang kebangsaan pelaku. Peran Divhubinter Polri dalam menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional, seperti Interpol menjadi krusial dalam menghadapi kejahatan lintas batas seperti *love scam*. Divhubinter harus diberdayakan untuk mengkoordinasikan investigasi lintas negara dengan lebih efektif termasuk pertukaran informasi dan bukti untuk memastikan pelaku dapat ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Lebih lanjut diperlukan pengawasan yang ketat terhadap proses penegakan hukum di setiap tahap, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman. Ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur hukum yang berlaku oleh Divpropam Polri serta peran Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dalam memastikan integritas dan profesionalisme Polri. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki proses internal kepolisian tetapi juga untuk terus meningkatkan integritas Polri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.